

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau penatausahaan transaksi belanja yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada KPPN Surabaya II serta tantangan, kendala dan solusi yang dihadapinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan belanja dilakukan melalui beberapa proses yaitu penatausahaan transaksi uang persediaan, penatausahaan transaksi langsung, penatausahaan setoran dan pungutan pajak, penatausahaan kas bendahara pengeluaran, dan penatausahaan pertanggungjawaban bendahara. Terdapat beberapa tantangan yang dialami oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan setiap transaksi seperti ketidakjelasan penulisan angka nominal pada bukti belanja, daya tahan bendahara, dan kemampuan dalam memahami peraturan perundangan terkait tugas dan fungsi bendahara. Selain itu, terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan jaringan dan pemeliharaan sistem pada aplikasi SAKTI. Solusi yang dapat diambil yaitu dengan menyampaikan keluhan yang dialami ke *website* HAI-DJPB.

Kata Kunci: *Bendahara Pengeluaran, Penatausahaan Transaksi, KPPN Surabaya II*

Abstract

This study aims to review the administration of shopping transactions carried out by the Treasurer of Expenditure at KPPN Surabaya II and the challenges, obstacles and solutions faced by it. This research uses a qualitative approach method through literature studies and field studies. The results showed that the administration of expenditures was carried out through several processes, namely the administration of supply money transactions, the administration of direct transactions, the administration of deposits and tax levies, the administration of the treasury of expenditures, and the administration of treasurer's accountability. There are several challenges experienced by the expenditure treasurer in arranging each transaction such as the vagueness of writing nominal figures on the evidence of expenditure, the durability of the treasurer, and the ability to understand laws and regulations related to the duties and functions of the treasurer. In addition, there are several obstacles related to network and system maintenance in the SAKTI application. The solution that can be taken is to submit the complaints experienced to the HAI-DJPB website.

Keywords: Expenditure treasurer, Transaction Administration, KPPN Surabaya II